

PANEN PADI SERENTAK BERSAMA PRESIDEN

## Lahan Terbatas, Yogya Siap Wujudkan Kedaulatan Pangan

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya akan terus berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan di tengah ketersediaan lahan pertanian yang terbatas. Upaya tersebut ditempuh salah satunya melalui pengolahan bahan pangan bersama para kelompok tani.

Komitmen itu disampaikan Walikota Yogya Hasto Wardoyo di sela panen padi serentak bersama Presiden RI Prabowo Subianto secara daring di lahan pertanian kawasan Giwangan Umbulharjo, Senin (7/4). "Presiden mengajak kita untuk bisa turun ke sawah, memanen hasil pertanian dan mendukung sektor pertanian," ungkapnya.

Pada kesempatan itu jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Yogya turut hadir. Di antaranya Komandan Kodim 0734 Yogya, Kapolresta Yogya, Kepala Kejaksaan Negeri

Yogya serta jajaran Pemkot Yogya.

Menurut Hasto, berdiskusi di bidang ekonomi salah satunya diwujudkan dengan membangun kedaulatan pangan. Hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan meskipun lahan pertanian di Kota Yogya sangat terbatas. Area persawahan di Kota Yogya saat ini hanya mencapai sekitar 32,67 hektare yang tersebar di Kemantren Umbulharjo, Tegalrejo, Mantrijeron, dan Kotagede. "Ini sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan rata-rata penduduk Kota Yogya. Makanya saya berharap tani di Kota Yogya

tidak hanya mengandalkan lahan karena memang sangat terbatas. Tetapi melalui kelompok tani bagaimana fokus ke pengembangan olahan pangan," urainya.

Dirinya mencontohkan, jumlah kelompok tani wanita yang mencapai sekitar 200 kelompok selama ini mampu konsisten mengolah lahan rumah tangga. Daya dukung menuju kedaulatan pangan bisa dilakukan dengan mengolah bahan pangan yang didatangkan dari luar daerah. "Kalau mengandalkan lahan pertanian jelas tidak mungkin. Meski lahan kita terbatas namun kita memiliki sumber daya



**Walikota Yogya bersama jajaran Forkompinda Kota Yogya secara simbolis memanen padi di kawasan Giwangan Umbulharjo.**

manusia yang berlimpah. Misal di Kulonprogo ada sentra teh, di sini bisa dibikin pojok teh yang menyajikan beragam olahan

teh. Begitu juga bahan makanan dari daerah lain, bisa diolah menjadi beragam di sini. Ya semacam reseler. Ini bisa meningkatkan pen-

dapatan petani," papar Hasto.

Selain itu, Hasto juga akan mengkaji kembali pajak bumi dan bangunan

(PBB) atas lahan pertanian. Dirinya mengaku kerap mendapatkan masukan perihal kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) atas tanah yang ikut berdampak pada semakin tingginya pajak yang harus disetorkan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Sukidi, menjelaskan jumlah kelompok tani setiap tahun sebenarnya terus bertambah. Akan tetapi penambahannya hanya kecil lantaran dua atau tiga kelompok. Hingga saat ini jumlah kelompok tani di Kota Yogya mencapai 288 kelompok, dan kelompok perikanan mencapai 216 kelompok. Pihaknya pun akan terus memberikan pendampingan agar seluruh kelompok tani tersebut mampu produktif. **(Dhi)-d**

EFISIENSI ANGGARAN PENGARUHI SEKTOR PARIWISATA

## Perlu Gencarkan Promosi dan Siapkan Strategi

**YOGYA (KR)** - Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada berbagai sektor, tidak terkecuali sektor pariwisata. Pemberlakuan kebijakan tersebut mulai dikeluhkan oleh pelaku industri pariwisata.

Menyikapi kebijakan tersebut, pengelola industri pariwisata perlu strategi yang tepat. Karena dampak dari kebijakan tersebut mulai dirasakan oleh para pelaku industri pariwisata salah satunya berkurangnya kegiatan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE). Karena kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga punya kontribusi yang cukup besar terhadap bisnis tersebut.

"Berkurangnya kegiatan MICE tentu berdampak pada menurunnya kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel (occupancy), pendapatan pada pelaku usaha kuliner, pusat oleh-oleh, souvenir, transportasi dan UMKM yang bergerak di sektor pariwisata lainnya.

Dengan begitu, pelaku industri pariwisata tidak boleh lagi bergantung pada kegiatan MICE yang biasanya diselenggarakan oleh pemerintah," kata pengamat pariwisata sekaligus Direktur Akademi Pariwisata Stipary Yogyakarta, Suharto MPar di Yogyakarta, Senin (7/4).

Suharto mengatakan, pelaku in-

dustri pariwisata perlu mulai fokus melakukan promosi pariwisata pada perusahaan swasta (corporate) untuk mengadakan kegiatan MICE di dalam negeri, wisatawan keluarga, grup traveller dan wisatawan asing. Selain itu, pelaku industri pariwisata dapat memaksimalkan event keagamaan, libur sekolah, dan event lainnya untuk mendatangkan wisatawan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan efisiensi anggaran misal dengan mengurangi jam operasional, mengurangi beban penggunaan AC dan listrik.

"Pelaku industri pariwisata dapat menjalin kerja sama dengan berbagai asosiasi dan pemerintah untuk mempromosikan potensi wisata yang ada di Yogyakarta. Selain itu penguatan promosi pariwisata dioptimalkan melalui media sosial sebagai bagian implementasi dari Digitalisasi Pariwisata Tourism 5.0," terangnya.

Lebih lanjut Suharto menambahkan, promosi dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan influencer, menjalin kerja sama dengan travel agent, perusahaan penerbangan, dan KAI. Selain itu, untuk mendatangkan wisatawan asing dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran para duta besar yang tersebar di berbagai negara untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. Supaya Yogyakarta bisa tetap menjadi primadona bagi wisatawan, pela-

ku industri pariwisata dapat mempromosikan potensi wisata yang dimiliki oleh masing-masing destinasi wisata, dengan menekankan pada wisata budaya khas Yogyakarta yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

"Selain beberapa hal di atas, yang tidak kalah penting adalah semua pihak termasuk warga masyarakat harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Kondisi ini tentunya membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, tidak terkecuali pemerintah," imbuhnya.

Suharto menjelaskan, para pelaku industri pariwisata, asosiasi dan pemerintah perlu duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang strategis untuk membuat regulasi yang tepat. Misal memberikan keringanan pada bidang perpajakan yang harus dibayarkan oleh pelaku industri pariwisata. Selain itu, pemerintah dapat mengimbau agar pelaku usaha swasta melakukan kegiatan MICE dan wisata di daerah masing-masing, guna mendorong pemulihan ekonomi.

Mensikapi kondisi yang tidak mudah itu, sudah semestinya para pelaku industri pariwisata mulai lebih fokus menggarap segmentasi pasar perusahaan swasta (corporate) dan mulai melirik potensi wisatawan MICE dari luar negeri (kawasan ASEAN) sebagai pengganti pasar domestik. **(Ria)-d**

## Kenaikan Suhu Bumi Ancam Ketahanan Pangan Nasional

**YOGYA (KR)** - Perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi telah menjadi ancaman serius yang semakin nyata bagi sektor pertanian, terutama bagi tanaman pangan yang menjadi sumber utama kebutuhan masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Data yang dirilis oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat Celsius dibandingkan dengan era pra-industri, menjadikannya tahun terpanas dalam sejarah selama satu dekade terakhir.

Jika tidak segera ditanggulangi dengan strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat, kondisi ini dapat memperburuk krisis pangan di masa depan, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, serta mengancam ketahanan pangan nasional yang selama ini menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pakar pertanian, agro-meteorologi, dan perubahan iklim UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho STP MAgr PhD menjelaskan bahwa kenaikan suhu bumi berdampak negatif terhadap tanaman pangan. Banyak tanaman mengalami gagal panen akibat meningkatnya suhu, penyebaran hama penyakit yang lebih luas, serta gangguan metabolisme tanaman yang menghambat pertumbuhan dan kualitas hasil panen.

"Semua komoditas pertanian terdampak, karena setiap tanaman memiliki kondisi lingkungan ideal untuk tumbuh optimal. Misalnya, teh membutuhkan suhu 13-25°C, sementara padi membutuhkan suhu 20-33°C. Jika suhu meningkat melebihi ambang batas, tanaman bisa mengalami kerusakan," ujar Bayu, baru-baru ini.

la melanjutkan, perubahan suhu bumi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan tanaman tetapi juga mengganggu pola tanam dan masa pa-

nen petani. Tenaga Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ini menjelaskan bahwa peningkatan suhu membuat petani harus menyesuaikan komoditas yang ditanam dengan varietas yang lebih tahan terhadap suhu tinggi dan tidak membutuhkan banyak air.

"Kita tidak bisa lagi menerapkan pola tanam seperti biasa. Dengan suhu yang lebih tinggi, tanaman membutuhkan lebih banyak air, sehingga jadwal tanam dan panen menjadi tidak menentu," tambahnya. Selain mengurangi produktivitas, kenaikan suhu bumi juga berdampak pada kualitas hasil panen secara signifikan, yang dapat merugikan nilai ekonomi serta aspek gizi dari hasil pertanian," ujarnya.

Bayu menekankan bahwa langkah utama menghadapi dampak perubahan iklim adalah dengan reboisasi dan adaptasi dalam sistem pertanian. Hal ini bisa dilakukan melalui adaptasi dengan menanam varietas yang lebih toleran terhadap suhu tinggi dan mengurangi ketergantungan pada tanaman yang membutuhkan banyak air.

Selain itu, inovasi dan teknologi pertanian juga berperan penting dalam menghadapi tantangan ini. Beberapa peneliti UGM telah menghasilkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap suhu tinggi, serta pengembangan bangunan pertanian seperti greenhouse dan plant factory yang dapat mengontrol suhu. Namun, Bayu mengakui bahwa penerapan teknologi ini masih terkendala oleh biaya yang tinggi.

Dalam menghadapi ancaman terhadap ketahanan pangan, akademisi dan pemerintah tentunya memiliki peran penting. Menurut Bayu, akademisi harus terus mengembangkan varietas yang lebih tahan terhadap suhu tinggi, sementara pemerintah perlu meningkatkan pendampingan bagi petani agar mereka dapat menyesuaikan jadwal dan pola tanam. **(Dev)-d**

## JCW Ingatkan Sanksi ASN yang Bolos Kerja

**YOGYA (KR)** - Jogja Corruption Watch (JCW) mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DIY maupun kabupaten/kota, untuk tidak bolos pada hari kerja setelah libur Lebaran 2025. Sebab, karena pada Senin 8 April 2025 para abdi negara sudah mulai beraktivitas kembali kerja seperti biasa.

Aktivis JCW, Baharuddin Kamba menuturkan, umumnya agenda masuk kerja pertama usai libur Lebaran adalah halal bi halal bersama pimpinan kepala daerah.

"Diharapkan, loket pelayanan tidak kosong. Acara halal bi halal dapat dilakukan secara bergantian agar pelayanan publik tidak terganggu. Apabila ada ASN yang bolos pada hari pertama masuk kerja pascalibur Lebaran, tentunya akan ada sanksinya," tutur Kamba, Senin (7/4).

Ditambahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat kewajiban dan larangan serta hukuman

disiplin bagi ASN yang tidak menaati kewajiban dan melanggar aturan yang telah ditetapkan.

"Sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 hingga Pasal 5 apabila ASN tidak menaati peraturan tersebut, maka ASN dijatuhi hukuman disiplin, dari hukuman ringan,

sedang, hingga berat," katanya.

Sebab, bolos kerja merupakan pelanggaran disiplin meskipun bukan merupakan korupsi secara langsung.

"Namun, perilaku bolos kerja dapat menjadi bibit korupsi," tambah Kamba. **(\*-1)-d**

**PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1996, PT.BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA yang bекеdudukan di Kab. Bantul selaku Penjual Lelang, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) terhadap objek lelang sebagai berikut:

Nama Nasabah **JOKO PERMONO**  
Dengan detail Objek Lelang beserta nilai limit dan Jaminan Penawaran Lelang:  
Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan, sebagaimana SHM Nomor: 02663, Luas 95 M2, atas nama Pemegang Hak **JOKO PERMONO**, Terletak di Dahrorno II RT 01, Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Harga Limit Rp.255.000.000,- Uang Jaminan Rp.76.500.000,-

Lelang akan dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Selasa 22 April 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d.batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 22 April 2025 Pukul 09.30 (sesuai waktu server)  
Alamat Domain : [portal.lelang.go.id](https://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](https://lelang.go.id)  
Tempat : KPKNL Yogyakarta Jalan Kusumanegara No.11 Yogyakarta.  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

**Syarat dan Ketentuan Lelang:**

- Calon Peserta Lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
- Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: <https://lelang.go.id> atau <https://portal.lelang.go.id>
- Calon Peserta Lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Internet pada alamat domain: <https://lelang.go.id> atau <https://portal.lelang.go.id>, kemudian merekam (scan) serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file \*.jpg, \*.png), dan nomor rekening atas nama Peserta Sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor Rekening tersebut). Calon Peserta Lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/perorangan diwajibkan mengunggah surat kuasa bermaterai cukup, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam satu file.
- Peserta Lelang diwajibkan menyertakan uang jaminan Lelang sesuai dengan pengumuman lelang disetor sekaligus (bukan dicicil) melalui *Virtual Account (VA)* dan sudah harus efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang. Nomor *Virtual Account (VA)* akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada Peserta Lelang.
- Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut di atas.
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi harga lelang ditambah bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang. Apabila tidak dipenuhi maka Pemenang Lelang dinyatakan wanprestasi, dan uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
- Objek lelang dalam kondisi apa adanya sebagai konsekuensi biaya tertanggung. Atas objek lelang, Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Untuk pengosongan Aset, menjadi tanggung Jawab Penuh Pemenang Lelang.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Yogyakarta atau PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA bagian Remedial & Recovery Telp 0274 413552, 389877. Bantul, 8 April 2025

**PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA**  
td  
**MARDIYANA, S.Pd, MM**  
Direktur Utama

DARINI SIP FRAKSI PDI PERJUANGAN

## Anggaran Memadai, Permudah Warga Yogya Akses JPD



**KOTA YOGYAKARTA**

Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya Darini S,IP menjelaskan terdapat banyak program yang diakomodir melalui JPD. Tidak hanya bagi warga yang masuk dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) melainkan juga non KSJPS. "Bagi anak didik dari KSJPS maka sudah jelas karena itu menjadi kewajiban pemerintah. Tetapi warga non KSJPS yang memiliki hambatan juga bisa mengakses JPD. Seperti siswa yang putus sekolah karena masalah biaya atau korban kekerasan, beasiswa prestasi tingkat kelurahan, siswa penyandang disabilitas serta bantuan biaya tunggakan di sekolah swasta untuk kenaikan kelas atau kelulusan," urainya.

Darini yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogya ini menilai, persoalan pendidikan terutama masalah biaya kerap menjadi keluhan masyarakat ketika jelang kenaikan kelas atau kelulusan. Padahal persoalan tersebut seharusnya mampu teratasi melalui berbagai program JPD yang dikelola oleh Dindikpora Kota Yogya. Kondisi itu menunjukkan masih ada masyarakat atau warga Kota Yogya yang belum memahami serta mengetahui cara mengakses JPD.

Oleh karena itu salah satu Srikandi DPRD Kota

**YOGYA (KR)** - Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogya menjadi harapan bagi warga yang mengalami persoalan pendidikan. Dengan dukungan anggaran memadai, idealnya semakin memudahkan warga yang berhak untuk mengakses JPD.

Yogya ini pun berharap sosialisasi dari semakin diintensifkan. Dindikpora sudah melakukan sosialisasi melalui media contoh di antaranya siaran radio tetapi sampai saat ini masih ada masyarakat yang belum mengetahui cara mengakses program tersebut. Artinya belum semua masyarakat yang membutuhkan mengetahui sehingga perlu adanya sosialisasi yang diperluas terutama dengan terjun ke setiap kelurahan dengan mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. "Jangan sampai karena ketidaktahuannya atas program JPD membuat anak didik mengalami putus sekolah karena masalah biaya. Ini harus kita antisipasi bersama karena dalam beberapa bulan ke depan sudah memasuki kenaikan kelas," imbuhnya

Keberadaan JPD selama ini juga menjadi jembatan dalam mengakses pendidikan. Warga Kota Yogya yang kalah bersaing dalam perebutan kursi di sekolah negeri juga tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya di sekolah swasta. Hal ini karena bantuan biaya di sekolah swasta bisa mencapai dua kali lipat dibanding sekolah negeri. Misalnya bantuan sekolah negeri jenjang TK dalam setahun Rp 800.000, maka di sekolah swasta mencapai Rp 1,7 juta. Untuk jenjang SD negeri mencapai Rp 800.000 setahun, di swasta mencapai Rp 2,8 juta. Begitu juga di jenjang SMP dan SMA swasta yang mencapai tiga kali lipat dari sekolah negeri.

Tingginya besaran bantuan pendidikan melalui JPD tidak lepas dari alokasi anggaran yang dikelola Dindikpora Kota Yogya. Tahun ini total anggaran di Dindikpora mencapai 22,41 persen dan menjadi OPD dengan pengampun anggaran tertinggi di Kota Yogya.

"Anggaran itu juga sudah di atas standar nasional. Kami di Komisi D juga selalu siap menjembatani masyarakat yang mengalami kendala pembiayaan pendidikan. Setiap tahun program JPD juga selalu kami evaluasi. Mana kala alokasinya masih kurang, kami juga siap memberikan dukungan sepanjang sesuai dengan kebutuhan," tandas Darini. **(Dhi)-d**



**KR-Ardhi Wahdan**